

**ANALISIS POLITIK UANG PADA PILKADA GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015**

Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
dalam Magister Ilmu Pemerintahan

TESIS



Oleh:
DEDE SUPRIANTO
20151040002

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

Motto dan Persembahan

Motto

"Intelligence is not the measurement, but intelligence support all"

Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan.

Pesembahan

Emak...

Bapak...

Dang...

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidaya-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Konsentrasi tesis ini pada kajian politik lokal dengan judul “**Analisis Politik Uang Pada Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015**”, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang terlibat membantu dari awal hingga selesai. Kiranya tidaklah berlebihan apabila dalam kesempatan ini ucapan yang terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiarto, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2. Ibu Dr. Dyah Mutiarin, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan beserta segenap dosen dan staf MIP,
3. Ibu Dr. Titin Purwaningsih., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan,
4. Bapak Dr. Suranto, M.Pol, selaku penguji I atas koreksi, saran dan masukannya,
5. Bapak Eko Priyo Purnomo, S.IP, M.Si, M.Res, Ph.D selaku penguji II atas koreksi, saran dan masukannya,
6. Kedua orang tuaku, Basiril Mukminin S dan Nina Hayati yang tulus memberikan cinta kasihnya, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan doanya.

7. Seluruh kawan-kawan seperjuangan MIP UMY angkatan 10 atas kebersamaannya,

Yogyakarta, 22 Desember 2017
Penulis,

Dede Suprianto
2015 104 0000

ABSTRAK

Dalam momentum politik seperti pilkada, praktik politik uang sulit untuk dihindarkan, termasuk pada perhelatan pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Pada pilkada tersebut, pasangan calon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dinilai terbukti memberi uang sebesar Rp. 5 juta kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan pola politik uang pada pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Bawaslu, KPUD dan Tim Sukses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk politik uang terdiri dari vote buying sebanyak 33 kasus, vote trading sebanyak 2 kasus dan club goods sebanyak 1 kasus. Semua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil serta kedaluwarsa kecuai kasus PPK Singaran Pati yang digugat pasangan Sultan-Mujiono ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK akhirnya menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan ambang batas suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak dengan selisih diantara keduanya sebesar 14%. Sedangkan pola politik uang yang digunakan kandidat terdiri atas 3 pola yaitu jaringan kekeluargaan, jaringan broker dan door to door. Jaringan kekeluargaan dipilih karena ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga menjadi kekuatan yang solid yang dapat digunakan sebagai kendaraan untuk mendistribusikan uang dan barang dengan penuh kepercayaan. Potensi untuk membelot dan menyeleweng sangat kecil karena faktor ketokohan dalam keluarga. Untuk jaringan broker dipilih karena hubungan komunikasi ke atas dan ke bawah yang baik, sehingga untuk mengambil dan mendistribusikan uang dan barang lebih mudah dan diberi jatah 20-30 orang. Sedangkan pola door to door dipilih sebagai alternatif terakhir jika pola kedua sebelumnya sudah dilakukan. Pada penelitian ini juga ditemukan perilaku pemilih yang menerima politik uang tidak serta-merta mempunyai hutang budi untuk memberikan hak suaranya. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan setiap stakeholder baik itu penyelenggara pemilu, kandidat, partai politik dan masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam meminimalisir kecurangan praktik politik uang, sehingga tercipta pilkada yang *free and fair*.

Kata kunci: Politik Uang, Pilkada.

ABSTRACT

In political momentum like general election (pilkada), money politics practice is difficult to avoid, including in general election event in Bengkulu Province, 2015. In the pilkada, candidate Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah proven that they gift money amounting to five million rupiah to members of the Kecamatan Selection Committee (PPK) Singaran Pati which has been sanctioned by permanent dismissal by the General Elections Administrator Council (DKPP). So the purpose of this research is to analyze the shape and pattern of money politics in the general elections on Bengkulu Province, 2015. The method who has been used in this research is qualitative, by using data collection technique which is interview and documentation. While, the target of this research is Bawaslu, KPUD and Team Success. The results of this study indicate that the form of money politics consists of vote buying as many as 33 cases, vote trading as much as 2 cases and club goods as much as 1 case. All of the reports were not followed up because they did not meet the formal and material requirements and the expiry date of the PPK Singaran Pati case sued the pair of Sultan-Mujiono to the Constitutional Court. Although the Constitutional Court finally dismissed the lawsuit based on the consideration of voice threshold between the applicant and the winner of the most votes by the difference between the two by 14%. While, the political pattern of money that candidate used consists of 3 patterns of family network, brokerage network and door to door. The family network is chosen because the strong emotional bond between family members becomes a solid force that can be used as a vehicle to distribute money and goods with confidence. The potential for defection and deviation is very small due to family cohesiveness. For the broker network is chosen because of good upward and downward communication links, so to take and distribute money and goods easier and given 20-30 people. While, the door to door pattern is chosen as the last alternative if the second pattern previously been done. In this study also found the behavior of voters who accept money politics does not necessarily have a debt of gratitude to give the right of voice. Suggestion from this research is expected every stakeholder be it election organizers, candidates, political party and society to equally involved in minimizing cheating money politics practice, so as to create free and fair local election.

Keywords: Money politics, local election.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR REVISI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	7
I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
I.3.1. Tujuan Penelitian	7
I.3.2. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORI	
II.1. Kajian Pustaka	9
II.2. Kerangka Teori	18
II.2.1. Teori Patron-Klien	15
II.2.2. Konsep Politik Uang	23
II.2.3. Konsep Pilkada	27
II.3. Kerangka Pikir	33
II.4. Definisi Konseptual	33
II.5. Definisi Operasional	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
III.1. Jenis Penelitian	35
III.2. Lokasi Penelitian	35
III.3. Jenis Data	35
III.4. Teknik Pengumpulan Data	36
III.5. Unit Analisis Data	37
III.6. Teknik Pengambilan Narasumber	37
III.7. Teknik Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
IV.1. Deskripsi Provinsi Bengkulu	39
IV.1.1 Gambaran Umum Provinsi Bengkulu	39
IV.1.2 Penduduk	43
IV.1.3 Nama-nama Gubernur Provinsi Bengkulu Dari Masa ke Masa	46
IV.1.4 DPRD Provinsi Bengkulu	46
IV.2. Profil Pelaksanaan Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015	47
IV.2.1 Daftar pemilih Tetap Provinsi Bengkulu Tahun 2015	48
IV.2.2 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	

Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	49
IV.2.3 Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	52
IV.3. Profil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.....	53
IV.3.1 Profil ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.....	53
IV.3.2 Profil Sultan Najamudin dan Mujiono.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
V.1. Bentuk Politik Uang.....	60
V.1.1 Vote Buying.....	78
V.1.1.2 Uang.....	78
V.1.1.3 Barang.....	83
V.1.2 Vote Trading.....	88
V.1.3 Club Goods.....	92
V.2. Pola Politik Uang.....	97
V.2.1 Jaringan Kekeluargaan (Tim Sukses non Formal).....	97
V.2.2 Jaringan Broker.....	101
V.2.3 Door to Door.....	104
BAB VI PENUTUP	
VI.1 Kesimpulan.....	111
VI.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.....	6
Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1. Data Sekunder	36
Tabel 4.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Provinsi Bengkulu.....	41
Tabel 4.3. Jumlah penduduk.....	43
Tabel 4.4. Presentase Pendidikan Yang Ditamatkan.....	44
Tabel 4.5 Nama-nama Gubernur Provinsi Bengkulu Dari Masa ke Masa.....	53
Tabel 4.6 Perolehan Suara Partai di DPRD Provinsi Bengkulu.....	54
Tabel 4.7 Daftar Pemilih Tetap Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	56
Tabel 4.8 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.....	57
Tabel 4.9 Perolehan Suara Per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	58
Tabel 4.10 Data Pribadi Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.....	61
Tabel 4.11 Riwayat Pendidikan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.....	62
Tabel 4.12 Riwayat Pekerjaan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.....	63
Tabel 4.13 Pengalaman Organisasi Ridwan Mukti dan	

Rohidin Mersyah.....	64
Tabel 4.14 Data Pribadi Sultan Najamudin dan Mujiono.....	65
Tabel 4.15 Riwayat Pendidikan Sultan Najamudin dan Mujiono.....	66
Tabel 4.16 Riwayat Pekerjaan Sultan Najamudin dan Mujion.....	66
Tabel 4.17 Pengalaman Organisasi Sultan Najamudin dan Mujiono..	67
Tabel 5.1 Daftar Pelanggaran Politik Uang Terlapor Ridwan Mukti Rohidin Mersyah.....	70
Tabel 5.2 Daftar Pelanggaran Politik Uang Terlapor Sultan Najamudin Mujiono.....	79
Tabel 5.3 Daftar Pelanggaran Politik Uang Terlapor Penyelenggara Pemilu.....	81
Tabel 5.4 Daftar Pelanggaran Politik Uang Terlapor Tidak Diketahui.....	83
Tabel 5.5 Ringkasan Jenis Politik Uang.....	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi	
Provinsi Bengkulu.....	41
Grafik 4.3 PRDB Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	
dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2015 (Miliar rupiah).....	46
Grafik 4.4 PDRB Perkapita ADHB Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah).....	48
Grafik 4.5 Distribusi PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2015.....	50
Grafik 4.6 Daftar Pemilih Tetap Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	56
Grafik 4.7 Suara Per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	59
Grafik 4.8 Perbandingan Data Pemilih Dengan Pengguna Hak Pilih..	60
Grafik 5.1 Partisipasi Pemilih.....	108